

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Politik luar negeri menjadi sebuah hal yang sangat penting bagi sebuah negara untuk berinteraksi dengan negara lain maupun dunia internasional. Politik luar negeri pada dasarnya digunakan oleh negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Politik luar negeri dapat diartikan sebagai sebuah *output* dari sebuah interaksi yang terjadi antara lingkungan domestik dengan lingkungan luar. Politik luar negeri dapat dikatakan menyesuaikan atau mengikuti perkembangan dan situasi dunia internasional dalam masa tertentu. Politik luar negeri sebuah negara dipengaruhi oleh cara pandang negara dan nilai nilai atau ideology yang dimiliki. Dalam hal ini, politik luar negeri Amerika Serikat membentuk pola antara intervensionis dan isolasionis. Intervensionis sendiri menurut KBBI merupakan kegiatan campur tangan pada urusan dalam negeri sebuah negara. Amerika Serikat sudah sejak lama dikenal sebagai sebuah negara yang sering mencampuri urusan negara lain, sedangkan Isolasionis adalah sikap cenderung menutup diri dari negara luar atau dunia internasional.

Salah satu politik luar negeri Amerika Serikat dalam hal ini adalah terkait dengan isu perubahan iklim dan lingkungan. Sebagai negara adidaya, pandangan Amerika Serikat terhadap isu iklim dan lingkungan tentu saja membawa pengaruh besar pada lingkungan global. Cara pandang Amerika Serikat terhadap isu tersebut memiliki keunikan tersendiri, yaitu dengan adanya perubahan cara pandang dan sikap serta kebijakan yang diambil oleh kepala negara yang menjabat saat itu.

Sebagai negara *superpower* dan negara kedua penghasil karbon terbesar setelah China, Amerika Serikat memiliki peran sangat penting dalam Perjanjian Paris. Pada era Presiden Barack Obama, Amerika menjadi negara yang meratifikasi Perjanjian Paris dengan cepat. Di masa pemerintahannya, Obama dikenal sangat antusias dalam mendukung keterlibatan Amerika dalam isu iklim dan lingkungan karena ia menyadari *urgensi* isu ini yang dapat mengancam keberlanjutan hidup manusia dimasa mendatang. Oleh karena itu, Obama banyak menunjukkan komitmen nya terhadap isu perubahan iklim dengan kebijakan salah satunya adalah bersedia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26-28% pada tahun 2025 mendatang yang dituangkan dalam rencana Nationally Determined Contribution atau NDC Amerika (Harrington, n.d.).

Setelah kepemimpinan Obama usai, Donald Trump terpilih menjadi Presiden ke 45 Amerika Serikat. Sejak masa kampanye, Trump banyak membuat janji kampanye yang kontroversial yang mengejutkan dunia, salah satunya adalah berjanji untuk membatalkan keanggotaan Amerika pada Perjanjian Paris yang sudah di ratifikasi oleh Amerika Serikat sebelumnya. Pernyataan Trump tersebut mengejutkan dunia, Amerika yang selama kepemimpinan Presiden Obama dikenal sangat mendukung gerakan global dalam bidang lingkungan dan perubahan iklim kini telah berubah haluan dan sikap nya dibawah kepemimpinan Presiden Trump yang pada tahun 2017 menginginkan Amerika untuk mundur dari Perjanjian Paris.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, penulis merumuskan masalah yaitu “Mengapa Amerika Serikat Mundur Dari Paris Agreement di Era Pemerintahan Presiden Trump?”

### **C. Landasan Teoritik**

Untuk menjawab rumusan masalah diatas, penulis menggunakan Teori Politik Luar Negeri dan Konsep Interest Groups untuk menjelaskan sebab mundurnya Amerika Serikat dari Perjanjian Paris pada era Presiden Donald Trump.

#### **1. Teori Politik Luar Negeri**

Dalam hubungan internasional, negara sebagai actor utama dalam hubungan internasional juga didukung oleh aktor non negara dalam peranannya untuk mencapai sebuah kepentingan nasional negaranya dengan membuat kebijakan luar negeri. Konsep kebijakan luar negeri menurut William D. Coplin adalah wujud mekanisme untuk memperjuangkan kepentingan nasional suatu negara yang didasarkan pada kaidah internasional yang ada (Sari, 2018).

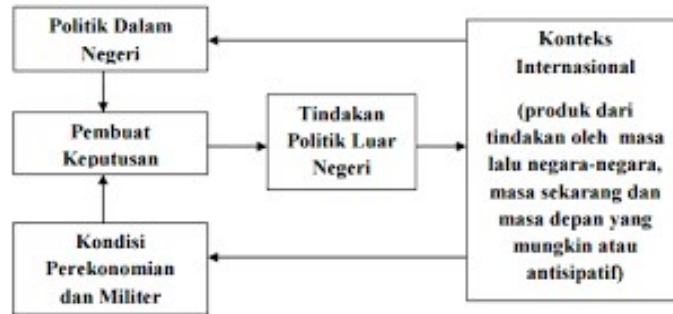
Kebijakan luar negeri merupakan sebuah output dari politik luar negeri sebuah negara. William D. Coplin merumuskan politik luar negeri merupakan sejumlah aktivitas yang di klasifikasikan dalam tiga konsiderasi yaitu kebijakan umum, keputusan-keputusan administratif dan keputusan-keputusan kritis. Kebijakan umum dalam klasifikasi tersebut terdiri dari serangkaian keputusan yang diungkapkan melalui pernyataan kebijakan dan tindakan yang dilakukan secara langsung, keputusan administratif merupakan keputusan yang dibuat oleh pejabat yang lebih rendah dengan kondisi spesifik yang dibatasi oleh ruang, lingkup dan waktu, sedangkan keputusan kritis adalah keputusan yang dibentuk karena adanya kondisi yang mendesak dan mempunyai dampak dalam jangka panjang.

Coplin juga mengidentifikasi tiga konsiderasi yang mempengaruhi pembuat keputusan dalam proses pengambilan tindakan politik luar negeri dalam tiga hal yaitu kondisi politik

dalam negeri, kemampuan ekonomi dan militer, serta konteks internasional.

Gambar 1.1

Model Proses Pembuatan Kebijakan Luar Negeri  
William D. Coplin



Sumber: William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*, Sinar Baru, Bandung, 1992, Hal.30.

Saat mempertimbangkan keputusan keluarnya Amerika dari Perjanjian Paris, pertimbangan Trump didasari oleh kondisi politik dalam negeri dan kondisi perekonomian Amerika dimana saat pemerintahan Trump, kelompok kepentingan memainkan peranan yang signifikan hingga dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri saat itu. Dari sisi ekonomi, pemerintahan Obama sempat melakukan pembatasan di sektor energi yang menurut Trump dapat berpengaruh terhadap perekonomian. Selain itu, berbagai bantuan dana yang diberikan Obama untuk kegiatan iklim menurut Trump merupakan sebuah hal yang merugikan Amerika. Bagi Trump berbagai kebijakan Obama akan sangat berpengaruh terhadap lapangan pekerjaan dan di

khawatirkan akan memicu kemunduran ekonomi hingga ketidakstabilan politik domestik.

Dengan pertimbangan tersebut, Trump yang memutuskan Amerika untuk keluar dari Perjanjian Paris merupakan sebuah upaya untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya terutama dalam bidang ekonomi sesuai dengan slogan Trump "*America first*" yang artinya segala tindakan dan keputusan Amerika harus selalu mengedepankan kepentingan Amerika dan slogan "*Make America Great Again*" untuk mengembalikan kejayaan perekonomian Amerika. Keputusan Trump yang kontroversial ini mengundang reaksi global. Sekretariat Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim menyatakan bentuk kecewa nya terhadap keputusan Trump. Para pemimpin negara dunia juga mengkritisi keputusan Trump ini yang akan memicu ketegangan geopolitik global yang baru (Citradi, 2019).

Dari bagan diatas, Coplin juga berupaya untuk menjelaskan aspek yang melatarbelakangi pembuat keputusan dalam mengambil sebuah kebijakan luar negeri. Dalam hal ini, terdapat pengaruh aktor domestik terhadap pembuatan kebijakan luar negeri yang disebut dengan *Policy Influencer* yang terbagi lagi kedalam empat kategori seperti *bureaucratic influencer*, *partisan influencer*, *interest influencer* dan *mass influencer* (Coplin, 1992a).

Dalam hal ini pengambilan keputusan politik luar negeri Amerika Serikat juga dipengaruhi oleh peran aktor politik salah satunya adalah *Partisan Influencer* atau Partai politik dan *Interest Influencer*. *Partisan Influencer* pada umumnya bertugas untuk menyampaikan tuntutan dan aspirasi masyarakat menjadi sebuah tuntutan politik, dalam hal ini adalah partai politik. Pada setiap partai mempunyai seorang perwakilan yang mempengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusan. *Partisan Influencer* berupaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan menggunakan tekanan. Peran dari *partisan Influencer* ini

juga cukup berpengaruh, tidak hanya untuk mempengaruhi kebijakan domestik namun juga untuk kebijakan luar negeri.

*Interest Influencer* merupakan sebuah kelompok yang terdiri dari gabungan orang yang memiliki kesamaan kepentingan dan memiliki aktivitas yang sama. Mereka yang tergabung dalam kelompok ini biasanya memiliki kesamaan kepentingan, terutama kepentingan ekonomi (Coplin, 1992a). Kepentingan ekonomi menjadi dasar bagi mereka untuk melakukan tindakan kolektif serta menjalankan perannya dalam pemerintahan.

## **2. Konsep Interest Groups**

Kelompok kepentingan adalah “*group of persons who share a common cause, which puts them into political competition with other groups of interests*”. Kelompok kepentingan ini biasanya berupaya untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan agar sesuai dengan kepentingan dan tujuan kelompoknya saja (Maiwan, 2016)

Kelompok kepentingan pengusaha yang terdapat dalam sistem perpolitikan Amerika yang juga tergabung di Partai Republik memainkan peranan yang sangat penting dalam mendukung kebijakan Trump karena kelompok kepentingan di Amerika Serikat memiliki pengaruh cukup besar untuk mempengaruhi pembuat kebijakan sebelum kebijakan tersebut dibuat dan implementasikan (Faturrahman, 2002). Untuk mempengaruhi keputusan, kelompok dalam partai ini memiliki strategi serta cara cara unik dengan menempati posisi strategis dalam pemerintahan serta melakukan *lobbying*. Dalam pemerintahan Trump sebagian pengusaha yang berasal dari Partai Republik menjabat dalam posisi strategis, seperti :

- a. Rex Tillerson yang menjabat sebagai mantan Menteri Luar Negeri AS dan juga mantan Direktur

Utama Exxon Mobil tahun 2006-2016 yang mendorong izin pengeboran di Arktik.

- b. Scott Pruitt yang merupakan mantan Jaksa Agung Oklahoma menduduki posisi di EPA (*Environmental Protection Agency*) yang mencabut kebijakan *Clean Power Plan* Obama pada 10 Oktober 2017.
- c. Rick Perry sebagai mantan Menteri Energi AS membuat kebijakan untuk menutup *Office Of International Climate and Technology* dan membuat subsidi untuk batu bara. (Kenny S. Abdiel, 2018).

Dalam buku "*The Power Elite*", karya C. Wright Mills memaparkan bahwa dalam pemerintahan Amerika terdapat beberapa *elite* yang memiliki pengaruh besar. Mills kemudian membagi peranannya kedalam tiga institusi yaitu ekonomi, politik, dan militer. Dalam institusi ekonomi, Mills menyatakan bahwa terdapat korporasi raksasa "*The Corporate Rich*" yang berisi golongan para pemilik industri raksasa di Amerika Serikat yang memainkan peran sangat penting terhadap perekonomian dan pemerintahan (Wright, 1956).

#### **D. Hipotesa**

Dari pembahasan yang telah dipaparkan, hipotesa penulis adalah Amerika Serikat mundur dari Perjanjian Paris pada pemerintahan Trump karena :

- 1) Adanya kepentingan pengusaha yang tergabung dalam Partai Republik yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika dalam isu iklim dan lingkungan.
- 2) Adanya kerugian ekonomi bagi Amerika apabila tetap tergabung dalam Perjanjian Paris.

- 3) Keinginan Trump untuk lebih mengutamakan kerjasama bilateral dari pada kerjasama multilateral yang menjadi inti dari slogan “America First”.

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan penyebab mundurnya Amerika Serikat dari Perjanjian Paris di era Presiden Trump dan menganalisa keterlibatan *Interest Group* (Pengusaha) dalam Partai Republik yang mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada tahun 2017-2019.

### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah metode pengumpulan data sekunder yaitu pengumpulan data melalui literatur jurnal, penelitian terdahulu dan referensi lain berupa buku, berita online dan website. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan analisa yang bersifat eksplanatif dengan menggunakan Teori Kebijakan Luar negeri dan Konsep *Interest Group* untuk menemukan korelasi data yang ditemukan.

### **G. Jangkauan Penelitian**

Untuk mencegah luasnya pembahasan dan memudahkan penulis dalam menyusun penelitian, maka pada penelitian ini penulis membatasi jangkauan lingkup penelitian yaitu pada era kepemimpinan Presiden Donald Trump tahun 2017-2019.

### **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan hal hal yang akan di jadikan pembahasan pada penelitian ini yaitu :

**BAB I** : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Landasan Teoritik, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Analisis data.



**BAB II:** Menjelaskan mengenai dinamika politik luar negeri Amerika Serikat terhadap isu iklim di periode pemerintahan Presiden Barack Obama dan Donald Trump.

**BAB III:** Pembahasan mengenai kebijakan Trump yang menarik diri dari Perjanjian Paris serta memaparkan penyebab atau faktor yang melatarbelakangi keputusan Trump dan implikasi nya terhadap komitmen global. Dalam bab ini penulis akan membuktikan hipotesa yang terdapat di Bab I.

**BAB IV:** Menjelaskan kesimpulan dari Bab I, Bab II dan Bab III.